

**STRATEGI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PILKADA 2018**

*(The strategy of the east Lombok regency KPU in increasing community
political participation in the 2018 regional election)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Strata Satu (S1)
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH

RAZIZUDDIN

NIM. 21513A0025

**KONSENTRASI POLITIK PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI STUDI PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
STRATEGI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT PADA
PILKADA 2018



Disusun dan diajukan oleh:

RAZIZUDDIN
NIM.21513A0025

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam siding skripsi

Mataram, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Lalu Sopian Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303


Lubis, S.Sos., M.Ikom
NIDN. 0804028601

Mengetahui.

Ketua Program Studi


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN
SKRIPSI
STRATEGI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT PADA
PILKADA 2018



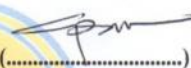
Disusun dan diajukan oleh

RAZIZUDDIN
NIM.21513A0025

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal **Juli 2019** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si Ketua (.....) 
NIDN. 0825038303
2. Lubis, S.Sos., M.Ikom Anggota 1 (.....) 
NIDN. 0804028601
3. Drs. H. Darmansyah, M.Si Anggota II (.....) 
NIDN.0008075914

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Drs. AMIL, M.M
NIDN. 0831126204

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : RAZIZUDDIN

Nim : 21513A0025

Tempat & Tanggal Lahir : Beririjarak, 10 Juli 1996

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : “ strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam
Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada
Pilkada 2018

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur jiblanan atau plagiat.
Pernyataan ini dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan
ketidak benaran, maka saya bersedia dituntut di dalam atau di luar pengadilan dan
menanggung segala resiko yang ada.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk
dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

KAZIZUDDIN
NIM. 21513A0025

“ strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada 2018 ”

Razizuddin

ABSTRAK

Dari hasil penelitian yang didapatkan pihak KPU menggunakan berbagai macam strategi dalam hal ini mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode dan seleksi penggunaan media memberikan dampak yang baik kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur. Dengan melakukan strategi tersebut dampaknya sangat besar pada proses pemilihan kepala daerah. Selain itu sosialisasi dilakukan bukannya kepada masyarakat tetapi juga melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah untuk menarik partisipasi pemilih pemula untuk bisa ikut dalam pesta demokrasi. Karena pemilih pemula merupakan salah satu regenerasi yang harus diberikan informasi yang banyak karena mengingat dari faktor umur mereka yang masih butuh banyak pengetahuan mengenai demokrasi politik di Indonesia. KPU Kabupaten Lombok Timur diharapkan bisa memiliki terobosan atau upaya baru dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih

Kata kunci : Strategi KPU, Politik, Partisipasi Pemilih

“ strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada 2018 ”

Razizuddin

ABSTRACT

From the result of the research obtained by the KPU using various strategy in this case knowing the audience, arranging the message, setting methods and selection of media use have a good impact on the community to be able to participate in regional elections in east Lombok regency. By carrying out this strategy the impact is very large on the proses of regional head election. In addition, the socialization was carried out no only to the community but also to socialize the school to attract the participation of beginner voters to be able participate in the democeartic party. Because the selections of beginers is one of regeneration that must be given a lot information because given the age factor they are still knowledge able about political democracy in Indonesia, east Lombok regency KPU expected to have a new break through or effort in order to increase voter participation.

Keywords: strategy KPU, politics, voter participation

MOTTO

Bila anda ingin bahagia. buatlah tujuan yang bisa mengendalikan pikiran, melepaskan tenaga serta mengilhami harapan anda, dengan cara niatkan, lakukan dan amalakan.

Persembahan

**Skripsi ini saya persembahkan,,,,
Untuk kedua orangtua saya, keluarga dan orang-orang tersayang
Yang telah banyak membantu dan
Memberikan dukungan selalu**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**STRATEGI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2018** ” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengembangan *sustainable tourism* sebagai strategi pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lombok Timur dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Kaprodi Studi Pemerintahan beserta jajarannya.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya.
5. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Lubis, S.Sos, M.I.Kom selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

7. Kedua orangtuaku tercinta yang telah memberikan doa, dorongan, dukungan secara moril dan materil selama penyusunan skripsi.
8. Saudaraku Ratih Amelya Sari, Amirul Mukminin, S.IP, Septian Kodrata, Sundu Siah, Zaini Darmansyah, S.IP, M. Isro'I Rizki, S.IP, Diani Nur Arpina, S.IP, Halimatussakdiyah dan Rahmat, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Teman – teman Studi Pemerintahan Angkatan 2015 yang telah berjuang bersama – sama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para keluargaku Bq. Candra herawati, Nurin, Nuruhin, Hayatun Nufus, Dedi Irawan dan M. Mustaqim yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya atas bantuannya baik berupa materi maupun pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan teori	14
2.2.1 Pengertian strategi	14
2.2.2 Tinjauan tentang komunikasi	15
2.2.3 Strategi komunikasi	26

2.3	Pengertian Partisipasi	32
2.4	Partisipasi politik.....	36
2.4.1	Bentuk-bentuk partisipasi politik	40
2.5	Tinjauan umum tentang KPU	41
2.5.1	Tugas dan wewenang KPU	42
2.6	Pengertian pemilihan umum.....	46
2.6.1	Tujuan dan fungsi pemilihan umum.....	49
2.7	Pemilihan umum kepala daerah	50
2.7.1	Model pemilihan umum kepala daerah	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Metode Pendekatan	55
3.2	Lokasi Penelitian	56
3.3	Sumber dan Jenis Data	56
3.3.1	Sumber Data	57
3.3.2	Jenis Data	59
3.4	Teknik Pengumpulan Data	60
3.4.1	Wawancara	60
3.4.2	Observasi	61
3.4.3	Dokumentasi	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	64

4.2	Hasil Penelitian	76
4.3	Pembahasan	88

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	92

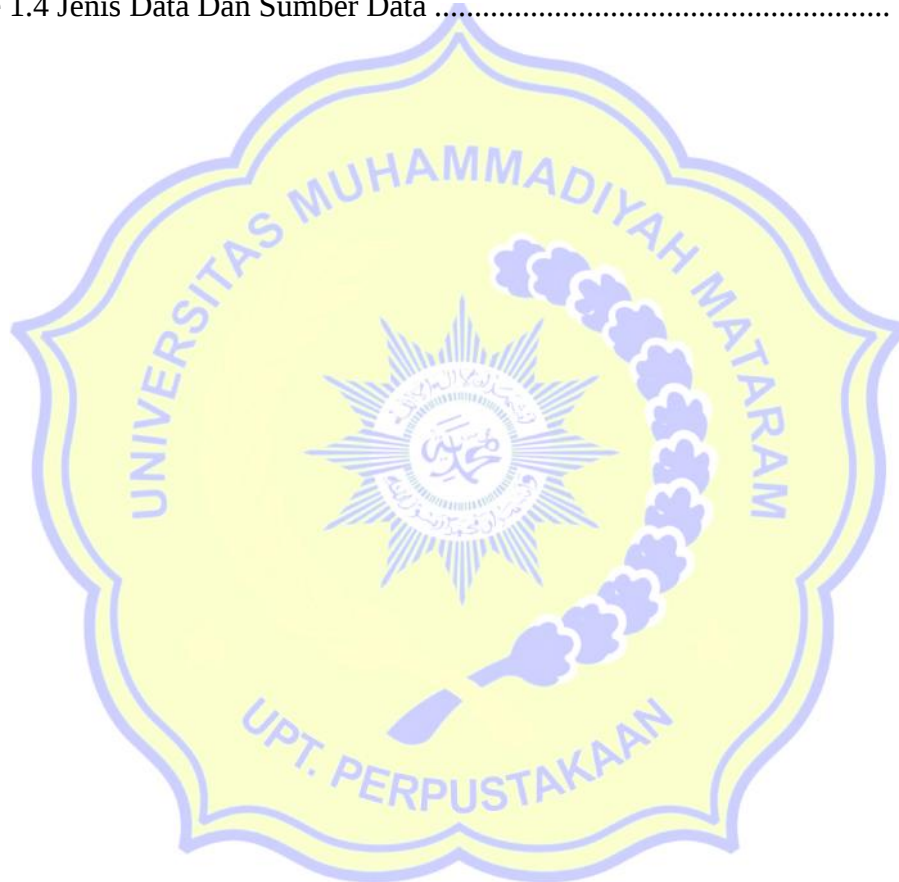
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peningkatan Partisipasi Pemilih.....	
Table 1.2 Kerangka Berpikir.....	
Table 1.3 Daftar Informan.....	
Table 1.4 Jenis Data Dan Sumber Data	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Pemilukada adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Lombok timur secara khususnya. Pemilukada dilaksanakan untuk memilih kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan untuk memilih bupati dan wakil bupati yang akan memimpin Lombok timur lima tahun kedepan. Pemilukada ini merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam menentukan sosok seorang pemimpin yang dibutuhkan dan di harapkan untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat yang menyangkut hidup orang banyak. Berbagai kebijakan akan diambil oleh kepala daerah untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan serta tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan peranan partisipasi masyarakat sangat penting. Karena partisipasi masyarakat sangat menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan diharapkan dapat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Terdapat dua alasan yang melatar belakangi peneliti mengambil tema tentang partisipasi politik dalam pemilukada kabupaten Lombok timur. Pertama, adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada tahun ini sebesar 2,40% bila di bandingkan dengan pemilukada tahun 2013. Pada pemilukada tahun 2018 partisipasi pemilih mampu menembus angka 76,66%. Untuk lebih jelasnya peningkatan partisipasi pemilih dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Peningkatan Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Lombok Timur

Tahun	Tingkat Partisipasi (%)
Pemilukada tahun 2013	74,26 %
Pemilukada tahun 2018	76,66 %

Sumber : KPU kabupaten Lombok timur, 2018

Kedua, tahun 2018 merupakan tahun politik bagi masyarakat kabupaten Lombok timur. Pada tahun 2018 masyarakat melaksanakan dua agenda pemilukada sekaligus yakni pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Tentunya perhatian masyarakat pada dunia politik cukup tinggi. Situasi ini akan sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi politik di kabupaten Lombok timur.

Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan KPU kabupaten Lombok timur dalam menyelenggarakan pemilihan. Keberhasilan demokrasi dapat dilihat dari partisipasi politik masyarakat sebuah daerah. KPU kabupaten Lombok timur menargetkan tingkat partisipasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2018 dapat naik dari tahun sebelumnya 2013 yang hanya 74,26%.

Usaha meningkatkan partisipasi berarti meningkatkan kesadaran berpolitik pada masyarakat. KPU kabupaten Lombok timur memilih mengarahkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018. Partisipasi terhubung dengan demokrasi, yang melibatkan

intraksi perseorangan dan organisasi, biasanya partai politik dan Negara. Dapat dilihat dari data partisipasi yang dimiliki oleh KPU kabupaten Lombok timur. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di bawah ini.

Berdasarkan partisipasi pemilih perkecamatan dari data KPU kabupaten Lombok timur yakni kecamatan Labuan haji 78,73%, selong 79,15%, sukamulia 78,95%, suralaga 77,74%, jerowaru 77,62%, keruak 74,83%, sakra 79,38%, sakra barat 75,06%, sakra timur 71,59%, montong gading 76,18%, sikur 78,34%, terara 75,40%, aikmel 77,47%, masbagik 77,74%, peringgasela 80,18%, peringgabaya 71,32%, sambalia 74,20%, sembalun 79,76%, suwela 75,21%, dan wanasaba 75,90% .

Pada wilayah kabupaten Lombok timur sendiri terdiri dari 20 kecamatan dengan 891.304 DPT pada pemilu pada tahun 2018, angka ini mengalami kenaikan sebesar 23.222 pemilih dari yang sebelumnya pada pemilu pada tahun 2013 hanya 868.082 DPT. Dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Lombok timur, kecamatan peringgabaya menjadi kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah yakni 69,69% pada tahun 2013 dan 71,32% pada tahun 2018. Walaupun mengalami kenaikan dari pilkada sebelumnya tetapi angka tersebut paling rendah dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten Lombok timur. Sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi paling tinggi yakni kecamatan selong sebesar 83,43% pada pemilu pada tahun 2013 dan kecamatan peringgasela sebesar 80,18% pada pemilu pada tahun 2018. Selama dua periode pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok timur tingkat partisipasi terhitung naik.

Walaupun demikian, KPU Kabupaten Lombok timur masih perlu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu pada tahun 2018 hanya 76,66%. Untuk meningkatkan partisipasi tentunya memerlukan sebuah strategi-strategi yang tepat sasaran untuk dapat mencapai tujuan. Strategi yang matang harus dibuat oleh komisi pemilihan umum kabupaten Lombok timur dalam manajemen pemilihan 2018.

Strategi juga dibutuhkan untuk dapat mengaplikasikan tujuan dari sebuah instansi dalam bentuk program. Sehingga dapat memberikan dampak yang nyata. Penggunaan strategi digunakan untuk menangani permasalahan terutama dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat. Diperlukan adanya sebuah strategi yang tepat untuk dapat memberikan dampak peningkatan partisipasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Lombok timur.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu pada tahun 2018.

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Lombok Timur :

1. Untuk mengetahui strategi seperti apa yang digunakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu pada tahun 2018
2. Mengetahui rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik pada pemilu pada tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Mampu digunakan sebagai referensi dalam kajian pengembangan ilmu politik terkait dengan strategi KPU Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai strategi pada tataran praktis khususnya cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi akademisi, praktisi, maupun instansi untuk memahami proses meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Strategi KPU dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat banyak dilakukan di berbagai lokasi dengan beragam penekanan atau fokus penelitian yang relevan dengan judul yang berbeda antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sumatera Utara Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Tahun 2018”** yang telah dilakukan oleh Nicolas Hariyanto mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dengan hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi KPU Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Sumatera Utara 2018 dapat disimpulkan, bahwa:

1. Analisis visi dan misi KPU Provinsi Sumatera Utara Isu dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT. Adapun komponen-komponen S-W-O-T dalam KPU Provinsi Sumatera Utara adalah;
 - a. Strength (S), yang menjadi kekuatan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah memiliki SDM yang mencukupi; memiliki regulasi; dan memiliki anggaran yang memadai.

- b. Weakness (W), yang menjadi kelemahan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah tidak adanya divisi khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara yang membidangi partisipasi masyarakat dan sosialisasi politik.
 - c. Opportunity (O), yang menjadi peluang KPU Provinsi Sumatera Utara adalah pemanfaatan teknologi informasi dan bekerjasama dengan 9 universitas dan SMA di Sumatera Utara.
 - d. Threat (T), yang menjadi ancaman di KPU Provinsi Sumatera Utara adalah apatisme masyarakat dan daftar pemilih tetap yang tidak akurat.
2. Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dirumuskan menggunakan matriks SWOT yang menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi. Alternatif-alternatif strategi tersebut yaitu:
- a. Strategi S.O dengan kombinasi kekuatan dan peluang yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa KPU dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Selain itu SDM di KPU juga dituntut untuk melek teknologi sehingga dapat menggunakan media sosial sebagai peluang untuk penyebaran informasi secara luas. Disamping itu anggaran yang dimiliki KPU dapat digunakan secara efektif dengan melakukan kerjasama bersama 9 universitas dan

SMA di Sumatera Utara sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat

- b. Strategi S.T dengan kombinasi kekuatan dan ancaman yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa KPU untuk meminimalisir tingkat apatisme masyarakat dengan meningkatkan kinerja kelompok peduli pemilu. Kelompok peduli pemilu ini melakukan pendidikan politik kepada kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok lainnya. Dibentuknya Kelompok peduli pemilu ini akan dapat mengefisiensikan waktu dan dana KPU sebab kelompok ini yang akan melakukan sosialisasi kepada beberapa kelompok masyarakat.
- c. Strategi W.O untuk meminimalisir tidak adanya divisi khusus yang membidangi partisipasi masyarakat dan sosialisasi masyarakat KPU Universitas Sumatera Utara menggunakan peluang yang ada yaitu memaksimalkan kinerja kelompok peduli pemilu, kelompok ini sebagai perpanjangan tangan KPU untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan untuk menunjang agar sosialisasi semakin efektif KPU juga memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai alat sosialisasi yang efektif, lalu SDM yang ada di KPU juga dapat di mobilisasi untuk terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

- d. Strategi W.T merupakan strategi yang bersifat defensif dan ditunjukkan untuk meminimalkan kelemahan. Ada 2 strategi yaitu meningkatkan koordinasi anggota KPU untuk meningkatkan parmas dan meningkatkan peran PPDP sebagai petugas pencocokan dan penelitian “coklit”.
3. Terdapat 3 bentuk kegiatan yang dilakukan KPU sebagai bentuk strategi meningkatkan partisipasi masyarakat.
- a. Forum Warga
- KPU turun langsung kepada masyarakat ditingkat RT/RW untuk memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, tidak lagi hanya mengundang tokoh masyarakat dan menugaskannya memberikan sosialisasi. Cara ini diharapkan dapat memperkecil sifat apatisme masyarakat di tingkat RT/RW.
- b. Komunitas Peduli Pemilu
- Komunitas ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok perempuan, tenaga pengajar, disabilitas dan lain sebagainya. Orang-orang yang terdiri dari komunitas ini diharapkan membentuk komunitas lagi di sekitar wilayahnya atau dengan kelompoknya dan memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dan masyarakat sekitar.
- c. Rumah Pintar Pemilu
- Rumah pintar pemilu ini dibentuk untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk belajar bagaimana sejarah terbentuknya

KPU, tata cara pelaksanaan pemungutan suara, dan informasi seputar pemilihan. Dirumah pintar pemilu juga terdapat contoh alat kelengkapan memilih, maket-maket dan alat peraga lainnya. Rumah pintar pemilu ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh kelompok maupun perseorangan. Penyediaan fasilitas pembelajaran kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan.

d. Ceramah oleh Komisioner KPU pada Saat Upacara

Komisioner KPU tingkat Kab/Kota setiap senin memberikan ceramah kepada para siswa/siswi pada saat upacara, ceramah yang diberikan menyinggung tentang pemilihan, diharapkan para siswa dapat memahami sedari dini tentang pemilihan dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.

e. memaksimalkan media sosial untuk sosialisasi

KPU untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media sosial. Banyaknya pengguna aktif media sosial menjadi latar belakang KPU memakai media sosial untuk menyebarkan informasi terkait pemilihan. Penggunaan media sosial juga dapat menghemat biaya sosialisasi.

2. Penelitian kedua dengan judul **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI KAMPAR**

TAHUN 2017” yang telah dilakukan oleh anizan mahasiswa Universitas Riau, dengan hasil penelitian :

Strategi atau upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan kepala daerah antara lain:

1. Strategi Penguatan

Meningkatkan kapasitas dan kualitas (*Capacity Building*) penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS maupun PPDP merupakan salah satu strategi penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh KPU Kampar. Bentuk peningkatan yang dilakukan adalah Bimbingan Teknis (BIMTEK), FGD, rapat kerja, sharing informasi melalui Whatsapp Group dan dalam bentuk penyuluhan.

2. Memperkuat Komunikasi dan Keterbukaan Informasi

Memperkuat komunikasi dan keterbukaan Informasi KPU Kampar kepada publik merupakan salah satu strategi KPU Kampar dalam penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat. Ada berbagai bentuk cara dari KPU Kabupaten Kampar dalam melakukan komunikasi dan keterbukaan informasi di antaranya yaitu melalui media sosial/internet. media cetak, media elektronik, melalui mesjid, melalui *Stakeholder*, rumah pintar pemilu dan papan informasi desa. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Menetapkan Metode. Pihak KPU menerapkan metode sosialisasi tatap muka bertemu langsung dengan

masyarakat untuk memberikan informasi serta dibantu oleh pihak lain agar memperlancar penyaluran informasi kepada masyarakat.

3. Penelitian selanjutnya dengan judul **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014”** yang telah dilakukan oleh Muh Imam Adli Aqil mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian pertama yaitu: masyarakat Kabupaten Gowa telah berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden pada tanggal 9 juli 2014 dalam rangka memilih capres dan cawapres akan tetapi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 ini, masih belum cukup efektif. KPU kabupaten Gowa harus terus bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi jumlah pemilih setiap perhelatan pemilu dilaksanakan terutama setiap penyelenggaraan pemilihan presiden. Mengingat data laporan KPU yang menyebutkan jumlah pemilih setiap diselenggarakan pemilu jumlah pemilih selalu saja meningkat dan yang menjadi sorotan utama yakni jumlah yang tidak menggunakan hak pilih juga terus meningkat. KPU Kabupaten Gowa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 yaitu.(1). Melakukan Sosialisasi Kemasyarakatan (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4). Program Relawan Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling.

Selain dari upaya, ada juga faktor pendukung dan penghambat peran KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan 86 presiden tahun 2014 diantaranya: faktor pendukung KPU Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014 yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden. Sedangkan faktor penghambat KPU Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014 yaitu (1). Letak Geografis, yang dimana Jika menuju lokasi sosialisasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok – kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. (2). Pola Pikir Masyarakat. (3). Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi mempunyai banyak arti. Dalam kehidupan sehari-hari strategi sering diartikan sebagai “siasat” atau “taktik. Kita sering menggunakan kata-kata strategi namun belum memahami artinya

secara luas. Liddell Hart mengatakan bahwa “strategi adalah seni mendistribusikan dan menerapkan cara militer untuk memenuhi kebijakan umum.” (Liliweri, 2011:241). Menurut Michael Porter (1996) “strategi merupakan tujuan jangka panjang, program kerja dan alokasi sumber daya. Strategi komunikasi merupakan cara dalam menentukan tujuan jangka panjang” (Wildan, 2012:27).

Mintzberg dan Quinn berpendapat ada beberapa hal yang berkaitan dengan strategi (Liliweri, 2011:24) yaitu :

1. Strategi sebagai sebuah rencana, maksudnya adalah bagaimana suatu cara untuk mencapai tujuan.
2. Strategi sebagai sebuah pola adalah sebuah tindakan konsisten dan teratur yang dijalankan organisasi dalam jangka waktu yang lama.
3. Strategi sebagai sebuah posisi adalah merupakan cara organisasi dalam menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat.

2.2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Komunikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pengiriman dan penyampaian pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami . Kata “komunikasi” yang dalam bahasa Inggris disebut “*communication*” merupakan adaptasi dari bahasa latin “*communication*”, bersumber dari kata “*communis*” yang mempunyai arti “sama” (Lilahi, 2010:4).

Maksud dari kata sama adalah sama makna, artinya komunikasi yang dilakukan harus mempunyai “kesamaan Makna”. Pengertian komunikasi secara terminologi banyak diungkapkan oleh para ahli yang menekuni ilmu komunikasi, antara lain: Menurut Andeson (1959) “komunikasi merupakan sebuah proses dimana kita bisa saling memahami satu sama lain. Komunikasi adalah proses yang selalu berubah sesuai dengan situasi yang berlaku” (Lilahi,2010:5).

Menurut Barelson dan Steiner (1964) “komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi dan keahlian melalui penggunaan symbol – symbol seperti kata, gambar, angka, dan lain-lain (Lilahi,2010:5). Menurut Cartier dan Harwood (1953) “komunikasi adalah proses yang mengarahkan perhatian seseorang ke tujuan mereplikasi memori” (Lilahi,2010:6). Theodore M. Newcomb “setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi tersendiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima” (Lilahi,2010:7).

Hovland mengatakan “komunikasi merupakan proses yang memungkinkan seseorang komunikan menyampaikan rangsangan yang biasanya adalah lambing lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain” (Lilahi,2010:7). Everet M. Rogers berpendapat bahwa “komunikasi merupakan proses dimana sebuah gagasan

dipindahkan dari sumber lepas suatu penerima atau lebih dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka”.

Menurut Raymond R Ross “komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan symbol-symbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator” (Lilahi,2010:7).

Dari keseluruhan pendapat para ahli tentang arti dan makna komunikasi terdapat beberapa kesamaan, diantaranya (1)komunikator ; (2)komunikan ; (3)pesan ; (4)media/saran/alat ; (5) efek.

Secara keseluruhan komunikasi mempunyai arti sebagai proses penyampaian pesan yang berupa lambang baik verbal ataupun non verbal oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan sarana atau media tertentu yang bertujuan untuk memberikan dampak perubahan kepada komunikan.

b. Karakteristik Komunikasi

Kata “Karakteristik berarti “mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu” (<http://kbbi.web.id/karakteristik>). Maksudnya adalah karakteristik menunjukkan sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh sesuatu.Sedangkan komunikasi menurut Barelson dan Steiner adalah proses penyampaian informasi,

gagasan, emosi dan keahlian melalui penggunaan symbol-simbol seperti kata, gambar, angka, dan lain-lain (Lilahi,2010:5).

Mengacu pada pengertian tersebut maka karakteristik komunikasi berarti sifat atau ciri khas dalam proses penyampaian pesan atau gagasan yang dilakukan. Komunikasi dalam setiap prosesnya selalu memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang terdapat dalam suatu proses komunikasi tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dalam tindakan komunikasi. Komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Emha Ainun Nadjib memiliki karakteristik sendiri. Peneliti membagi karakteristik tersebut menjadi tiga bagian yaitu; tatanan komunikasi; model komunikasi; dan fungsi komunikasi.

c. Fungsi Komunikasi

Sebagai suatu proses yang dilakukan terus menerus, komunikasi mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengacu kepada makna dari komunikasi, fungsi komunikasi adalah sebagai menyampaikan pesan. William I. Gorden membagi fungsi komunikasi menjadi empat bagian penting.

Pertama, fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial; maksudnya adalah bahwa komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain

dengan komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain (Mulyana,2004:5). Melalui komunikasi manusia melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan kelompok sosial masyarakat. Disinilah fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial.

Kedua, fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif. Fungsi kedua ini sangat erat kaitannya dengan fungsi pertama yakni fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial. Komunikasi sebagai fungsi ekspresif bisa dilakukan sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak serta merta bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, tetapi dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita (Mulyana,2004:12). Perasaan-perasaan yang dimaksud dalam fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif biasanya dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal, seperti lukisan dan tulisan.

Ketiga, fungsi komunikasi sebagai komunikasi ritual; fungsi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok sosial masyarakat. Komunikasi ritual berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam hal melakukan upacara-upacara atau ritual. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran,

perkawinan, sunatan, ulang tahun, sirman, pernikahan, hingga upacara kematian (Mulyana,2004:5). Ritual-ritual lain yang menggambarkan fungsi komunikasi sebagai komunikasi ritual adalah upacara-upacara keagamaan seperti berdoa, sholat, sembahyang, misal, membaca kitab suci, naik haji dan upacara-upacara keagamaan lainnya. *Keempat*, fungsi komunikasi sebagai komunikasi instrumental; yaitu komunikasi yang digunakan yang bertujuan untuk memberikan efek langsung kepada komunikan. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur (Mulyana,2004:30). Dengan kata lain komunikasi instrumental biasanya memiliki muatan pesan persuasive dalam setiap prosesnya.

d. Model - Model Komunikasi

Ada banyak model-model komunikasi yang telah dibuat oleh para pakar. Model-model komunikasi tersebut mempunyai ciri khas dan kekhasan masing-masing tergantung pada latar belakang keilmuan (pembuat) model komunikasi tersebut. Berikut adalah beberapa model komunikasi.

1. Model S-R

Model stimulus – respons (S-R) adalah model komunikasi yang paling fundamental. Model ini dipengaruhi

oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi-reaksi” yang sangat sederhana (Mulyana,2004:143). Analogi sederhana dari komunikasi model S-R adalah ketika seseorang tersenyum kepada orang lain dan orang tersebut membalas senyuman tersebut itulah yang disebut pola S-R. Jadi model S-R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat tertentu akan merangsang orang lain untuk membalas dengan respon tertentu.

2. Model Aristoteles

Model komunikasi Aristoteles merupakan model komunikasi paling klasik yang juga biasa disebut model retorik (rhetorical model). Model komunikasi yang dikemukakan Aristoteles mencakup pada tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara (speaker), pesan (message), dan pendengar (listener). Komunikasi model Aristoteles terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya merubah sikap mereka (Mulyana,2004:145).

3. Model Lasswell

Model komunikasi yang dikemukakan oleh Lasswell sering diterapkan dalam komunikasi massa, model tersebut mengemukakan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Unsur sumber (who) merangsang pertanyaan mengenai

pengendalian pesan, sedangkan unsur penerima (says what) merupakan bahan untuk menganalisis isi. Saluran komunikasi (in which channel) digunakan dalam mengkaji analisis media. Unsur penerima (to whom) dikaitkan dengan analisis khalayak, sedangkan unsur pengaruh (with what effect) berhubungan dengan studi mengenai akibat yang dihasilkan dari sebuah proses komunikasi massa pada khalayak pembaca, pendengar atau penerima (Mulyana, 2004:147)

e. Tatahan Komunikasi

Tatanan komunikasi adalah proses komunikasi ditinjau dari dari jumlah komunikan, apakah hanya satu orang komunikasi, sekelompok orang, atau sejumlah orang yang bertempat tinggal secara tersebar (Effendi, 2000:52). Mengacu pada pengertian tersebut maka komunikasi diklasifikasikan menjadi:

1. Komunikasi Intrapribadi

Komunikasi intrapribadi (personal communication) adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang tersebut berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan (Effendi, 2000:37). Pendapat lain mengenai komunikasi intrapribadi seperti yang dijelaskan oleh Ronald L. Applbaum. Ia mendefinisikan komunikasi intrapribadi sebagai “komunikasi yang berlangsung dalam diri kita; ia meliputi kegiatan berbicara kepada diri kita sendiri dan kegiatan-

kegiatan mengambil dan memperoleh makna kepada lingkungan kita”.(effendi,2000:58)

2. Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi Antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi antar komunikator dengan seorang komunikan (Effendi,1992:8). Joseph A. Devito memberi definisi lain tentang komunikasi antarpribadi yaitu “proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (Effendi,2000:60). Komunikasi antarpribadi dianggap sebagai tatanan komunikasi paling efektif dalam upaya mempengaruhi komunikan atau memberi efek komunikasi pada komunikan. Hal ini karena komunikasi antarpribadi berlangsung dua arah dan bersifat dialog. Maksudnya adalah antara komunikator dan komunikan dapat memberi umpan balik.

3. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok (Group communication) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Pengkalisifikasian ini mengacu bukan pada hitungan matematis, melainkan kesempatan komunikan dalam menyampaikan tanggapannya.(effendi,1992:8)

a. Komunikasi Kelompok Kecil

Suatu komunikasi bisa dikatakan sebagai komunikasi kelompok kecil (small group communication) apabila dalam prakteknya komunikasi kelompok kecil bisa diubah menjadi komunikasi antarpribadi dengan setiap komunikan.(effendi,1992:36). Robert F. Bales mendefenisikan komunikasi kelompok kecil sebagai:“sejumlah orang yang terlibat dalam interaksi satu sama lain dan suatu pertemuan yang bersifat tatap muka, dimana setiap individu atau anggota kelompok tersebut mendapatkan kesan atau penglihatan antara satu sama lainnya.”(effendi,2000:72)

b. Komunikasi Kelompok besar

Komunikasi diklasifikasikan dalam komunikasi kelompok besar apabila dalam proses komunikasi kelompok tersebut ada situasi dimana antar komunikator dan komunikan sukar terjadi komunikasi antarpersona seperti yang terjadi dalam komunikasi kelompok kecil.(effendi,1992:9)

f. Hambatan Komunikasi

Komunikasi sebagai sistem bisa saja mengalami sebuah gangguan pada unsur unsur yang ada didalam setiap proses komunikasi berlangsung. Menurut Shannon dan Weaver gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi terhadap salah satu

komponen komunikasi, sehingga dalam prosesnya komunikasi tidak berjalan efektif (Cangara, 2013:37).

Hambatan atau gangguan komunikasi dapat dibedakan menjadi delapan macam yakni; (1) Gangguan teknis yaitu gangguan yang terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam proses komunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang disampaikan melalui saluran mengalami kerusakan;

(Cangara, 2013:38). (2) Gangguan semantik yaitu gangguan yang terjadi akibat adanya kesalahan dalam penggunaan bahasa. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan komunikator berbeda dengan bahasa yang digunakan penerima, dan komunikator terlalu banyak menggunakan istilah-istilah asing yang tidak dapat dipahami komunikan; (Cangara, 2013:38). (3) Gangguan psikologi yaitu gangguan yang berasal dari dalam diri pelaku komunikasi; (Cangara, 2013:38). (4) Rintangan fisik, yaitu rintangan yang disebabkan oleh faktor kondisi geografis. Dalam komunikasi antarpribadi rintangan fisik juga dapat dipahami sebagai rintangan organik pada fisik manusia, seperti gangguan disfungsi salah satu panca indera komunikasi; (Cangara, 2013:39). (5) Gangguan status yaitu adanya kesenjangan status sosial diantara pelaku komunikasi. (Cangara, 2013:39). (6) Rintangan kerangka berfikir yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Hal ini disebabkan oleh faktor latar belakang

pengalaman dan pendidikan. (cangara,2013:39). (7) Rintangan budaya yaitu rintangan yang terjadi karena adanya perbedaan norma, nilai, kebiasaan yang dianut antara komunikator dan komunikan. (cangara,2013:39). (8) Rintangan birokrasi yaitu terhambatnya proses komunikasi yang disebabkan oleh struktur organisasi. (cangara,2013:39) Jadi, hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menyebabkan proses komunikasi berjalan tidak efektif, baik faktor eksternal maupun internal pada pelaku komunikasi.

2.2.3 Strategi Komunikasi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang artinya tentara dan kata “agein” yang berarti pemimpin. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang, atau suatu rancangan hyang terbaik untuk memenangkan peperangan. . (cangara,2013:61). Menurut middleton strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal. (cangara,2013:61).

Strategi komunikasi secara umum adalah cara atau rancangan rencana yang digunakan demi mencapai suatu tujuan dengan lebih efektif dan tepat guna agar tujuan organisasi bisa tercapai.(effendy,2011:32). Strategi komunikasi mempunyai tujuan sentral. R. Wayne Pace, Brent

D.Peterson, dan M. Dallas dalam bukunya, *Techniques For Effective Communication*, menyatakan bahwa ada tiga tujuan sentral dari kegiatan komunikasi, yaitu: (effendy,2011:32)to secure understanding, to establish acceptance, and to motivate action.

Pertama adalah to secure understanding memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Jika komunikan sudah mengerti dan menerima, maka penerimanya itu harus dibina (to establish acceptance). Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan (to motivate action).

a. Langkah Penyusunan Strategi Komunikasi

Penyusunan strategi komunikasi merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi. Dalam tahap menyusun strategi yang paling penting adalah menentukan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Tahap ini menjadi penting karena bisa menentukan hasil dari proses komunikasi yang dilakukan. Pemilihan strategi yang tepat akan menghasilkan proses komunikasi yang efektif.

1. Identifikasi Target Khalayak (audience)

Strategi komunikasi pertama yang harus dilakukan dalam proses komunikasi adalah identifikasi target khalayak. Identifikasi target khalayak dimaksudkan adalah melakukan pemetaan (mapping) terhadap komunikan. (cangara,2013:98). Menurut Onong Uchjana Effendy ada dua factor yang harus kita perhatikan pada diri komunikan, antara lain: Pertama, faktor kerangka referensiPesan

komunikasi yang akan disampaikan harus memerhatikan keangka referensi (frame of reference). Kerangka referensi seseorang terbentuk dalam diri seseorang sebagai konsekuensi dari paduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideology, cita-cita. (effendi,2011:36); Kedua, Faktor situasi dan kondisi. Maksud dari faktor situasi dan kondisi adalah situasi komunikasi pada saat komunikasi akan menerima pesan dari komunikator. (effendi,2011:36). Situasi yang bisa menghambat jalannya proses komunikasi bisa diduga sebelumnya atau datang tiba-tiba. Yang dimaksud dengan kondisi adalah kondisi personal komunikasi pada saat akan menerima pesan dari komunikator. komunikasi tidak akan efektif apabila kondisi psikologis komunikasi sedang tidak baik. Misalnya kondisi dimana komunikasi sedang marah, sedih, sakit, lapar atau mengantuk.

2. Menetapkan komunikator

Komunikator menjadi bagian penting dari proses komunikasi. Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Karena pentingnya posisi komunikator dalam proses komunikasi, maka jika suatu proses komunikasi tidak berhasil dengan baik atau tidak efektif kesalahannya terletak pada komunikator. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu seorang komunikator yang akan bertindak sebagai ujung tombak

suatu program harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kreativitas.(canggara,2013:108). James McCroskey menjelaskan bahwa kredibilitas seorang komunikator dapat diperoleh dari kompetensi (competence), sikap, tujuan, kepribadian (personality) dan dinamika. Kompetensi ialah penguasaan yang dimiliki seorang komunikator pada masalah yang dibahasnya. Kepribadian menunjukkan apakah pembicara memiliki pribadi yang hangat dan bersahabat, sedangkan dinamika menunjukkan apakah materi yang disampaikan menarik atau membosankan. (canggara,2013:109)

3. Memilih Media dan Saluran Komunikasi

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media. Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi dan tujuan pesan yang ingin disampaikan dan jenis media yang dimiliki oleh khalayak.(canggara,2013:120). Secara garis besar ada dua jenis media,yaitu media lama dan media baru. Media lama meliputi media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media format kecil, saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi publik. Sedangkan media baru meliputi internet dan telepon seluler.(canggara,2013:123-124).

4. Menyusun Pesan

Tujuan utama dari proses komunikasi adalah penyampaian pesan. Pesan komunikasi (message) mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan tertentu dari sebuah pesan inilah yang akan menentukan teknik mana yang akan digunakan dalam proses komunikasi, apakah teknik persuasi, informasi, atau teknik instruksi. Pesan sangat bergantung pada program yang akan disampaikan. Jika program itu bersifat komersil untuk mengajak orang agar membeli barang yang dipasarkan, maka pesannya bersifat persuasive dan provokatif. Sedangkan jika produk dalam bentuk program penyuluhan untuk penyadaran masyarakat maka sifat pesannya harus persuasive dan edukatif. (canggara,2013:114).

5. Ukur Keberhasilan Yang Dicapai

Pada tahap ini, program komunikasi yang sudah dijalankan perlu dievaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Tujuan tahap ini adalah untuk mengetahui apakah khalayak sudah mengerti isi pesanyang disampaikan, dan apakah ada perubahan sikap dan perilaku pada khalayak sesuai dengan yang diinginkan oleh program atau tujuan awal program tersebut dilaksanakan. (canggara,2013:100). Tujuan strategi komunikasi meliputi:

a. Memberitahu (Announcing)

Tujuan strategi komunikasi yang pertama adalah pemberitahuan tentang kapasitas dan kualitas informasi (one of the first goal of your communication strategi is to announce the availability of information on quality) (liliweri,2013:248).

Sebagai analogi adalah jika sebuah perusahaan baru ingin mengajak orang untuk berinvestasi maka yang dilakukan perusahaan adalah memberitahu kualitas dan kapabilitas perusahaan agar investor bersedia menanam saham di perusahaan tersebut.

b. Memotivasi (motivating)

Tujuan strategi komunikasi sebagai motivasi maksudnya adalah sebagai seorang komunikator maka kita harus mengusahakan agar informasi yang kita sampaikan memberi motivasi bagi masyarakat. (liliweri, 2013:248)

c. Mendidik (Educating)

Tujuan strategi komunikasi yang ketiga adalah mendidik. Maksudnya adalah dalam setiap informasi dikemas dalam kemasan educating. (liliweri, 2013:249). Contohnya bila kita mengeluarkan informasi tentang acara amal donor darah maka informasi yang kita keluarkan adalah tentang manfaat donor darah..

d. Menyebarkan Informasi (Informing)

Salahsatu tujuan strategi komunikasi adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atau audiens yang menjadi sasaran kita. Diusahakan agar informasi yang dikeluarkan adalah informasi actual, spesifik, sehingga dapat bermanfaat untuk audiens. (liliweri, 2013:249).

e. Mendukung Pembuatan Keputusan

Tujuan strategi yang terakhir adalah mendukung pembuatan keputusan. Dalam rangka pembuatan keputusan, maka informasi yang dihimpun, dikategorisasi, dianalisis sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi acuan utama bagi pembuatan keputusan. (liliweri,2013:249).

2.3 Pengertian Partisipasi

Ramlan Subekti (1999:140) mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka sistem pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 (2007: 237), partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu Negara demokrasi sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Karena pada umumnya Negara yang demokrasi memilih seorang pemimpin dengan jalan diadakannya Pemilihan Umum.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986 : 349-352), ada beberapa jenis partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan oleh partisipan dalam anjang sono (pertemuan atau rapat).
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan oleh partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan oleh partisipan berbentuk harta benda.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan oleh partisipan untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan partisipan keikutsertaan dalam proses social. Misalnya, dalam acara arisan, melayat (dalam hal kematian), kondanga, dan sebagainya.

Morris Rosenberg (dalam Purna Irawan 2008: 18) mengemukakan ada tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, Pertama, karena ketakutan akan konsekwensi negatif dari aktivitas politik. Orang beranggapan bahwa aktifitas politik merupakan ancaman dalam kehidupannya. Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupoan politik merupakan kesia siaan. Mereka merasa sia – sia karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sementara itu, Frank Lindenfeld (dalam Purna Irawan, 2008 : 19) mengemukakan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam

studinya Lindenfeld juga mengemukakan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang tereliansi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Milbart (2006: 46) menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, Pertama, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, Kedua, karena factor karakteristik seseorang. Orang – orang berwatak social yang punya kepedulian besar terhadap problem social, politik, ekonomi dan sebagainya., Ketiga, factor karakter social seseorang. Orang – orang yang berwatak social. Karakter social seseorang menyangkut status social ekonomi, kelompok persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Keempat, factor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Lijan Poltak Sinambela (2006: 37-38), tujuan dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara professional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya.

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Sukrizal 2006:11) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk turut serta aktif didalam

kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Di Negara Indonesia telah berulang-ulang kali diselenggarakan Pemilihan Umum yang disebut dengan pesta demokrasi rakyat Indonesia. Baik semasa orde lama, orde baru, sampai pada orde reformasi. Hal ini menunjukkan didalam Negara demokrasi masyarakat sangatlah penting untuk ikut aktif didalam memilih pemimpin, baik itu pemimpin Negara, maupun pemimpin kelompok.

Helbert McClosky (2009: 367) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (2009: 368), partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Demokrasi akan bisa berjalan jika masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan, dengan kata lain masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah.

2.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga Negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dalam hubungan Negara –negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Miriam Budiarjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan

pemerintah (*public policy*). Terahir menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif. Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah kegiatan atau keikutsertaan warga Negara dalam proses pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan , membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sementara itu, Milbaret dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori.

1. Apatist artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spectator artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik , yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Milbarth (dalam surbakti, 1992:143), menyebutkan empat factor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik :

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik.
2. Karena factor karakteristik seseorang, orang-orang yang berwatak social yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan social, politik, ekonomi dan lainnya.
3. Factor karakter social seseorang, menyangkut setatus social ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik.
4. Factor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut (Merphin panjaitan, 2000:8), mengatakan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar demokrasi Negara tersebut.

Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintah, dengan demikian berarti pememrintahan rakyat. Sebagaimana diungkapkan Giddes (dalam ghofur, 2002:15), bahwa demokrasi pada dasarnya mengandung makna sisitem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan.

Dalam suatu Negara demokrasi, sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sebagai tolak ukur dari keberhasilan system politiknya. Semakin banyak warga Negara yang berpartisipasi menunjukkan bahwa semakin berhasilnya system politik Negara tersebut. Tetapi kalau partisipasi politik warga Negara rendah maka dapat dikatakan system politiknya kurang baik.

Demokrasi langsung adalah system demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada wakilnya untuk membicarakan dan menentukan persoalan-persoalan kenegaraan.

Dalam demokrasi langsung dapat diterapkan dalam pemilihan seorang pejabat public, misalnya pemilihan presiden, gubernur, bupati/wali kota secara langsung. Di Negara Indonesia menganut demokrasi langsung karena terlihat dari adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ditinjau dari hubungan antar alat kelengkapan Negara itu adalah system negara dengan system parlementer dan demokrasi dengan system presidensial. Di Indonesia menggunakan demokrasi presidensial hal ini dapat dilihat presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara.

Demokrasi dengan sistem presidensial yaitu, pertanggung jawaban pemerintahan Negara berada pada presiden. Presiden sebagai kepala

pemerintahan dan kepala Negara bertanggung jawab kepada rakyat atau lembaga yang mengangkatnya.

2.4.1 Bentuk-bentuk partisipasi politik

Huntington mengemukakan bahwa partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain :

1. Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye.
2. Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya (arifin, 2003:140).

Sejalan dengan Huntington, Almond (dalam Mas'ood dan Andrews, 1997:48), juga mengemukakan ada dua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat yakni partisipasi politik konvensional yang meliputi : pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan potensi, berdemostrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik manusia, serta perang dan gerilya.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005: 135-138), partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Partisipasi dalam pemilihan.
2. Partisipasi kelompok.

3. Kontak antar warga Negara dengan pemerintah
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Lebih lanjut Huntington menyatakan ada dua sifat partisipasi politik yakni partisipasi otonom dan partisipasi yang mobilisasi. Partisipasi politik yang otonom maksudnya adalah partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya sendiri. Sedangkan partisipasi yang mobilisasi adalah partisipasi yang diberikan atas dasar rangsangan atau tindakan atas intruksi dan sebagian besar digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat, atau rasa takut terhadap seseorang pemimpin (Samuel p. hutington, 1990:173).

Partisipasi yang otonom ini biasanya terdapat dalam masyarakat yang maju sedangkan di Negara berkembang yang masyarakat belum begitu maju sering kita jumpai partisipasi yang sifatnya mobilisasi.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Komisi pemilihan umum

Menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah (2007:78) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum Definisi di atas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945

merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi pemilihan umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nam komisi pemilihan umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945 , tetapi kewangnya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah di tegaskan dalam pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersipat nasionan, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa komisi pemilihan umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara berispat nasional, tetap dan mandiri (independen).

2.5.1 Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur

dalam Pasal 18, 19 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,yaitu:

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~ PPS, dan KPPS dalatn wilayah kerjanya
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota
- b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
- m. melaksanakan putusan DKPP
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.6 Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.6.1 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk

- a) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.7 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menurut Joko J. Prihatmoko (2005: 112-124) Pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan demikian, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa adanya intervensi sama halnya mereka memilih presiden dan wakil presiden dan wakil-wakilnya di legislatif dalam pemilu.

Pilkada dalam UU No. 10 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi, kabupaten/ kota untuk memilih gubernur, bupati/ walikota secara langsung dan demokratis. Kemudian pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi kabupaten/ kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

manat UUD 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing antar daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam suatu sistem Negara kesatuan republik Indonesia. Pilkada langsung mengambil hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang sudah ada dalam rangka rekrutmen lokal secara demokratis.

Berdasarkan UU No.10 tahun 2016 pasal 2, menyebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada langsung yang berkualitas diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang independen, mandiri, netral dan transparan. Suksesnya pilkada langsung tergantung tiga unsur yaitu; system, tata cara dan penyelenggara itu sendiri. Penyelenggara pemilu ini yang akan melaksanakan sistem dan tata cara pemilu pada setiap elemen atau aktor politik. Oleh karena itu, kinerja penyelenggara pemilu akan sangat menentukan proses dan hasil pemilu.

Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan tahapan-tahapan kegiatan. Disinilah KPU sebagai penyelenggara pilkada harus bersikap mandiri dan non partisipan. KPU secara teknis bertugas melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, dari tahapan pendaftaran pemilih sampai penetapan calon terpilih. KPU membuat regulasi, mengambil keputusan, dan membuat

kebijakan yang tentu saja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dapat disimpulkan yang dimaksud pemilihan kepada daerah adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara dengan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

2.7.1 Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan

memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.

Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila :

- 1) Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur;
- 2) Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
- 3) Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan
- 4) Akuntabilitas publik.

Tabel 1.2 kerangka berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Melaksanakan suatu kegiatan penelitian dibutuhkan metode atau cara yang sesuai sehingga penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Hal tersebut didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis dari data-data yang diperoleh dari sumber penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara umum yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang bisa diamati. Penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi harus dipandang sebagai bagian dari keutuhan. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005:5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada.

Sesuai dengan ulasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian dalam ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan melibatkan beberapa objek sebagai sumber memperoleh suatu informasi. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi objek alamiah, yang dimana antar peneliti dengan fokus penelitian tidak di isolasi kedalam variabel atau hipotesis, karena peneliti dengan tempat penelitiannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Peneliti juga merupakan pemeran kunci dalam penelitian ini, karena penelitian pada hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu daerah atau kawasan tertentu. Jadi, melalui pendekatan deskriptif kualitatif penulis bermaksud mampu memaparkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam masalah penelitian yang ditujukan yakni menganalisis strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2018.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi instansi atau kantor penelitian ini adalah Kantor KPU kabupaten Lombok timur.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Moleong (2005:83) bahwa data merupakan segala keterangan dan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari apa yang diamati, didengar, dirasa dan dipikirkan oleh peneliti.

3.3.1 Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisa data.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Informan

Merupakan sumber data primer, meliputi kata-kata maupun tindakan dari orang-orang yang terlibat selama peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2018. informan dalam penelitian ini melibatkan orang-orang dari Kantor KPU kabupaten Lombok timur. Adapun orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 1.3 Daftar Informan Sebagai Sumber Data Primer

No	Informan	Jabatan
1	TAHARUDIN, SH.MH	Devisi hokum dan pengawasan KPUD kabupaten Lombok timur
2	ISLAHUN NAILI, S.Kom	Kasubag program dan data KPU kabupaten Lombok timur
3	MULYADI, SE	Devisi SDM dan partisipasi masyrakat KPU kabupaten Lombok timur
4	RONI ARDI IRMAWAN, S.Ap	Kasubag teknis KPU kabupaten Lombok timur
5	KHOLIS ISKANDAR, SH	Kasubag Hukum KPU kabupaten Lombok timur

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

3. Dokumen

Berbagai dokumen terkait tentang strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2018. Juga bisa dijadikan sebagai sumber data. Baik Undang-Undang, tap MPR, PERPRES, data statistik maupun foto-foto akan dijadikan sebagai sumber data skunder untuk mendukung dan memperkuat data primer.

Tabel 1.4 Jenis Data dan Sumber Data

No	Jenis Data	Sumber Data
1	Persentase partisipasi pemilih pilkada tahun 2013 dan 2018	Kasubag data KPU kabupaten lombok timur
2	UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum	Devisi teknis penyelenggara pemilu KPU kabupaten Lombok timur
3	UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik	Devisi teknis penyelenggara pemilu KPU kabupaten Lombok timur

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

3.3.2 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperlukan peneliti. Data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai hasil pengumpulan yang dilakukan peneliti selama berada dilokasi penelitian.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data skunder bukanlah data yang langsung diperoleh peneliti, melainkan melalui tangan kedua dan seterusnya. Data skunder dapat berupa data tertulis seperti statistik,

laporan kegiatan, notulensi rapat, dokumen resmi dan sebagainya. Data skunder dalam penelitian ini berupa data dari kantor KPUD kabupaten Lombok timur, dan data pendukung dari internet, buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, hal ini tidak terlepas dari fungsi data itu sendiri yang digunakan sebagai bahan untuk analisis penelitian. Teknik pengumpulan data yang sesuai akan memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah penelitian sehingga hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Berdasarkan subyek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan. Menurut Meloeng (2002: 135) menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang strategi KPU kabupaten Lombok timur.

Hasil wawancara ini adalah berupa data deskriptif yang nantinya akan digunakan untuk pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan beberapa kali dan dengan informan yang berbeda-beda. Pengumpulan data melalui teknik wawancara ini dilakukan dengan narasumber Ketua KPU kabupaten Lombok timur, komisioner KPU kabupaten Lombok timur dan Masyarakat dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti.

3.4.2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik yang langsung terjun dan melihat keadaan peningkatan partisipasi politik masyarakat kabupaten Lombok timur. Sapah, Burhan Bungin (2011: 118) mengungkapkan bahwa metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria: pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data dan fenomena-fenomena, baik berupa peristiwa maupun tindakan dalam situasi yang sesungguhnya”. Pada penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi atau pengamatan berperanserta (participant observation), yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti.

Menurut Bodgan (1972: 3) dalam Lexy J. Moleong (2000: 117) mendefinisikan secara tepat bahwa, “Pengamatan berperanserta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan”.

3.4.3. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk memperkuat data tentang strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Burhan Bungin (2011: 124) menyatakan bahwa metode dokumentasi atau dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian yang dilakukan di Kantor KPU kabupaten Lombok timur ini data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat data tentang strategi KPU kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dokumen dalam

penelitian ini berupa surat-surat, data-data informasi, gambar (foto-foto kegiatan), dan berkas-berkas profil KPU kabupaten Lombok timur.

